

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi tetap menjadi salah satu tantangan yang paling meluas dan mengakar kuat yang dihadapi negara-negara berkembang, dengan Indonesia secara konsisten berada di antara negara-negara dengan indeks kerentanan korupsi yang signifikan seperti yang dilaporkan oleh Transparency International.(Santoso, 2025; Mohammed et al., 2026a) Fenomena korupsi tidak lagi terbatas pada struktur birokrasi dewasa; bukti empiris semakin menunjukkan bahwa akar perilaku korup terbentuk selama masa remaja, tahap perkembangan kritis di mana penalaran moral, identitas etis, dan disposisi perilaku secara aktif dibentuk. Memahami korupsi bukan hanya sebagai masalah hukum atau politik tetapi sebagai masalah perilaku dan psikologis telah membuka jalan baru untuk intervensi pencegahan, khususnya dalam lingkungan pendidikan.(Hardi, 2023; Mohammed et al., 2026b).

Para siswa sekolah menengah di Indonesia memegang posisi penting dalam wacana nasional tentang antikorupsi, karena mereka mewakili generasi penerus pegawai negeri, profesional, dan pemimpin masyarakat.(Hardi, 2023; Rengifo, 2025a) Namun, literatur yang ada menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara penyampaian

kurikulum anti-korupsi dan internalisasi nilai-nilai berbasis integritas di kalangan siswa. Pendekatan konvensional terhadap pendidikan anti-korupsi sebagian besar bergantung pada transmisi kognitif penyediaan informasi tentang hukum, peraturan, dan konsekuensi kelembagaan tanpa cukup membahas dimensi afektif dan perilaku dari pembentukan karakter.(Campbell et al., 2026; Rengifo, 2025b). Keterbatasan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan intervensi yang lebih berlandaskan psikologi yang menargetkan mekanisme mendasar dari perilaku korupsi di tingkat individu.

Layanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah menengah di Indonesia menawarkan *platform* yang strategis untuk memberikan intervensi tersebut. Konselor sekolah dilatih secara unik untuk menangani perkembangan psikologis, sosial, moral, dan emosional siswa melalui konseling individu, konseling kelompok, psikoedukasi, dan program bimbingan terstruktur. Terlepas dari potensi ini, integrasi eksplisit pengembangan karakter anti-korupsi dalam kerangka konseling sekolah masih kurang berkembang secara teoritis dan kurang dieksplorasi secara empiris.(Frydman et al., 2022; Crego et al., 2022)Sebagian besar studi yang ada di Indonesia telah meneliti pendidikan anti-korupsi melalui lensa pendidikan kewarganegaraan atau pengajaran agama, sehingga dimensi konseling sebagian besar belum dieksplorasi.

Kerangka teoritis yang mendukung studi ini bersumber dari

Teori Pembelajaran Sosial, yang menyatakan bahwa perilaku moral termasuk kejujuran, akuntabilitas, dan integritas diperoleh melalui pembelajaran observasional, penguatan, dan pengaturan diri kognitif. Melengkapi hal ini, Teori Disengagement Moral memberikan lensa penjelasan kritis untuk memahami bagaimana remaja merasionalisasi perilaku tidak jujur atau korup dengan secara selektif melepaskan standar moral mereka (Rachmawati & Siswanto, 2025). Ketika siswa menunjukkan agensi moral yang rendah dan disengagement moral yang tinggi, mereka menjadi rentan terhadap perilaku yang mencerminkan korupsi struktural yang diamati dalam masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, intervensi konseling yang dirancang untuk meningkatkan agensi moral, memperkuat efikasi diri, dan mendorong pengambilan keputusan etis secara teoritis dibenarkan sebagai mekanisme pencegahan terhadap kecenderungan tersebut.(Padmasari et al., 2025; Awais et al., 2025).

Secara empiris, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa program konseling terstruktur khususnya konseling kelompok dan pendekatan kognitif-perilaku efektif dalam memodifikasi pola perilaku maladaptif di kalangan remaja, termasuk agresi, kecurangan akademik, dan penyimpangan sosial.(Bullock et al., 2022; Purwaningsih, 2024)Namun, penerapan spesifik intervensi konseling pada ranah pengembangan karakter anti-korupsi di kalangan siswa sekolah menengah di Indonesia belum diteliti secara

sistematis.(Saulnier & Krettenauer, 2023; Morales-Sánchez & Ruiz-Palomino, 2023)Studi ini mengatasi kesenjangan tersebut dengan meneliti hubungan antara intervensi konseling dan pengembangan sifat-sifat karakter anti-korupsi termasuk kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan di kalangan siswa sekolah menengah di Indonesia.

Signifikansi penelitian ini semakin diperkuat oleh konteks kebijakan nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012, telah mewajibkan integrasi pendidikan anti-korupsi di semua tingkatan pendidikan formal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak dini sebagai solusi struktural jangka panjang untuk pemberantasan korupsi. Namun, penerjemahan mandat kebijakan ini ke dalam intervensi perilaku yang efektif dan berbasis bukti di sekolah masih belum lengkap. Studi ini berkontribusi untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik tersebut dengan memberikan bukti empiris dari perspektif intervensi konseling.

Penelitian ini dipandu oleh tiga tujuan penelitian utama: pertama, untuk mengidentifikasi tingkat karakter anti-korupsi yang dominan di kalangan siswa sekolah menengah di Indonesia; kedua, untuk menilai efektivitas intervensi konseling terstruktur dalam meningkatkan pengembangan karakter anti-korupsi; dan ketiga, untuk menganalisis dimensi spesifik karakter anti-korupsi yang paling

responsif terhadap pendekatan berbasis konseling. Dengan menjawab tujuan-tujuan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang baru pada keterkaitan antara konseling sekolah, pendidikan karakter, dan upaya anti-korupsi dalam konteks pendidikan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakter anti-korupsi siswa sekolah menengah sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan dan konseling terstruktur?
2. Apakah layanan bimbingan dan konseling terstruktur efektif dalam meningkatkan karakter anti-korupsi siswa sekolah menengah?
3. Apakah peningkatan karakter anti-korupsi siswa tetap bertahan setelah intervensi layanan bimbingan dan konseling terstruktur berakhir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan perubahan karakter anti-korupsi siswa sekolah menengah sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan dan konseling terstruktur.
2. Menganalisis efektivitas layanan bimbingan dan konseling terstruktur dalam meningkatkan karakter anti-korupsi siswa

sekolah menengah.

3. Menganalisis keberlanjutan peningkatan karakter anti-korupsi siswa setelah intervensi layanan bimbingan dan konseling terstruktur berakhir.

D. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek berikut.

1. Penelitian ini mengkaji pengembangan karakter anti-korupsi melalui intervensi layanan bimbingan dan konseling, sedangkan penelitian sebelumnya di Indonesia lebih banyak memfokuskan pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Agama
2. Penelitian ini memberikan bukti empiri mengenai efektifitas layanan bimbingan dan konseling terstruktur dalam meningkatkan karakter anti-korupsi siswa sekolah menengah, sehingga memperluas implementasi pendidikan anti-korupsi yang selama ini lebih berorientasi pada aspek kognitif.
3. Penelitian ini menggunakan *Social Learning Theory* dan *Moral Disengagement Theory* sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan mekanisme psikologis pembentukan karakter anti-korupsi melalui intervensi konseling, yang masih jarang digunakan secara terpadu dalam penelitian bimbingan dan konseling di Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Karakter Anti Korupsi

a. Pengertian Karakter

Karakter merupakan seperangkat nilai, sikap, keyakinan, dan kebiasaan yang tertanam dalam individu sehingga menjadi dasar dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku secara konsisten. Karakter tidak terbentuk secara instan, tetapi berkembang melalui proses belajar, interaksi sosial, pengalaman hidup, dan pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam perspektif psikologi perkembangan, karakter merupakan hasil internalisasi nilai-nilai moral yang mempengaruhi kemampuan individu dalam mengambil Keputusan dan mengendalikan perilaku (Lickona, 1991).

Karakter terdiri atas tiga komponen utama, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Moral knowing berkaitan dengan kemampuan memahami nilai-nilai moral, moral feeling berkaitan dengan sikap dan komitmen emosional terhadap nilai tersebut, sedangkan moral action merupakan implementasi nilai moral dalam perilaku nyata. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam membentuk

individu yang berintegritas.(Lickona, 1991).

Sementara itu, Berkowitz dan Bier (2005) menjelaskan bahwa karakter merupakan Kumpulan karakteristik psikologis yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak secara etis, bertanggung jawab, dan menghargai norma sosial. Dengan demikian, karakter dapat dipahami sebagai integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan perilaku yang menjadi landasan seseorang dalam menjalani kehidupan sosial.

b. Pengertian Karakter Anti-Korupsi

Karakter anti-korupsi merupakan seperangkat nilai moral yang mendorong individu untuk menolak segala bentuk perilaku korupsi serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter anti-korupsi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai bahaya korupsi, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku nyata yang mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2022), pendidikan karakter anti-korupsi bertujuan membentuk generasi yang memiliki integritas tinggi sehingga mampu mencegah praktik korupsi sejak usia dini. Pendidikan tersebut diarahkan agar peserta didik mampu menginternalisasi nilai-

nilai antikorupsi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Menurut psikologi sosial, karakter anti-korupsi berkaitan erat dengan perkembangan identitas moral dan kemampuan individu dalam mengendalikan moral disengagement. Individu yang memiliki identitas moral yang kuat cenderung lebih konsisten dalam mempertahankan perilaku etis meskipun menghadapi tekanan sosial (Bandura, 1999; Aquino & Reed, 2002).

c. Aspek-Aspek Karakter Anti-Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan sembilan nilai utama karakter anti-korupsi yang menjadi dasar pendidikan integritas di Indonesia (KPK, 2022), yaitu:

1) Jujur

Kejujuran merupakan kemampuan individu untuk mengatakan dan melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan tanpa melakukan manipulasi, kebohongan, maupun kecurangan.

2) Peduli

Peduli merupakan sikap memperhatikan kepentingan orang lain, lingkungan, serta Masyarakat sehingga individu tidak melakukan Tindakan yang merugikan pihak lain

3) Mandiri

Mandiri adalah kemampuan individu menyelesaikan tugas tanpa bergantung secara berlebihan kepada orang lain serta mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

4) Disiplin

Disiplin merupakan kepatuhan terhadap aturan, norma, dan komitmen yang telah disepakati Bersama.

5) Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah kesediaan individu menerima konsekuensi dari setiap Keputusan maupun Tindakan yang dilakukan

6) Kerja keras

Kerja keras merupakan kesungguhan individu dalam mencapai tujuan melalui usaha yang maksimal tanpa menggunakan cara-cara yang melanggar aturan.

7) Sederhana

Sikap sederhana menunjukkan kemampuan individu mengendalikan keinginan hidup berlebihan sehingga tidak terdorong melakukan penyalahgunaan kekuasaan maupun harta.

8) Berani

Keberanian merupakan kemampuan mempertahankan nilai-nilai kebenaran serta berani menolak maupun melaporkan tindakan yang bertentangan dengan hukum

dan moral.

9) Adil

Adil berarti memperlakukan semua orang secara proporsional tanpa diskriminasi, nepotisme, maupun penyalahgunaan wewenang. Kesembilan nilai tersebut saling berkaitan dan membentuk karakter integritas yang menjadi fondasi perilaku anti-korupsi (KPK, 2022)

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Karakter

Menurut teori perkembangan karakter, pembentukan karakter dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, yaitu:

1) Faktor individu

Meliputi perkembangan kognitif, kematangan emosi, kepribadian, moral identity, kemampuan regulasi diri (*self-regulation*), dan efikasi diri (*self-efficacy*) (Bandura, 1986)

2) Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang menanamkan nilai moral melalui pola asuh, komunikasi, keteladanan, serta pengawasan orang tua. Pola asuh yang demokratis terbukti lebih efektif dalam membentuk karakter positif dibandingkan pola asuh otoriter maupun permisif (Baumrind, 1991).

3) Faktor teman sebaya

Menurut Bandura (1986), perilaku individu dipengaruhi oleh proses observasi terhadap lingkungan sosial. Teman sebaya menjadi model perilaku yang sangat kuat pada masa remaja.

4) Faktor sekolah

Sekolah berperan melalui budaya sekolah, keteladan guru, layanan bimbingan dan konseling serta implementasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran (lickona, 1991).

5) Faktor budaya dan lingkungan sosial

Norma sosial, budaya organisasi, media massa, serta kondisi Masyarakat dapat memperkuat maupun melemahkan pembentukan karakter anti-korupsi.

e. Perkembangan Karakter pada Remaja

Remaja merupakan fase perkembangan yang sangat penting dalam pembentukan karakter karena terjadi perubahan biologis, kognitif, sosial, dan emosional secara cepat. Menurut Erikson (1968), remaja berada pada tahap Identity versus Role Confusion, yaitu masa ketika individu berusaha menemukan identitas dirinya melalui eksplorasi nilai, keyakinan, dan tujuan hidup.

Tahap ini, remaja memiliki kemampuan berpikir abstrak dalam masa perkembangan sehingga remaja mampu

memahami konsep moral yang lebih kompleks (Piaget, 1972). Selain itu, menurut Kohlberg (1984), Sebagian besar remaja mulai memasuki tingkat Conventional Morality, yaitu perilaku moral yang didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan sosial, penerimaan kelompok, dan penghargaan terhadap norma masyarakat. Alasannya karena perkembangan moral pada masa remaja masih dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sekolah menjadi tempat strategis untuk mengembangkan karakter anti-korupsi melalui pendidikan karakter, konseling kelompok, pembiasaan perilaku jujur, serta pemberian teladan oleh guru. Oleh karena itu, intervensi psikologis yang diberikan pada masa remaja memiliki peluang besar untuk membentuk perilaku antikorupsi yang menetap hingga dewasa.

2. Konseling Kelompok

a. Pengertian konseling kelompok

Konseling kelompok merupakan salah satu bentuk layanan bantuan psikologis yang dilakukan dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sebagai media untuk membantu anggota memahami diri, mengembangkan potensi, menyelesaikan masalah, serta meningkatkan kemampuan penyesuaian diri. Berbeda dengan konseling individual, konseling kelompok memungkinkan anggota belajar dari pengalaman, umpan balik, dan interaksi

antaranggota sehingga proses perubahan perilaku menjadi efektif.

Konseling kelompok merupakan hubungan interpersonal yang terstruktur antara konselor dengan beberapa anggota kelompok yang bertujuan membantu anggota mengembangkan perilaku yang lebih adaptif melalui interaksi kelompok. Sehingga memungkinkan anggota memperoleh dukungan sosial, belajar dari pengalaman orang lain, serta mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah. (Gladding, 2020)

Prayitno (2017) mendefinisikan konseling kelompok sebagai layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu anggota mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir secara efektif. Dinamika kelompok menjadi kekuatan utama karena setiap anggota dapat saling memberi dukungan, masukan, dan pembelajaran.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok adalah suatu proses bantuan profesional yang dilakukan dalam kelompok kecil dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu anggota mengembangkan pemahaman diri, meningkatkan kemampuan interpersonal, mengatasi permasalahan, serta

membentuk perilaku yang adaptif.



b. Tujuan konseling kelompok

Tujuan utama konseling kelompok adalah membantu individu mencapai perkembangan pribadi dan sosial secara optimal melalui interaksi yang terjadi dalam kelompok. Menurut *Association for Specialists in Group Work* (ASGW, 2007) konseling kelompok bertujuan membantu anggota meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan kemampuan interpersonal, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan, meningkatkan kemampuan mengelola emosi, dan membangun perilaku lebih adaptif.

Sementara itu Corey (2021) mengemukakan bahwa tujuan konseling kelompok meliputi, membantu anggota memahami dirinya secara lebih mendalam, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan hubungan interpersonal yang sehat, mengurangi perilaku maladaptive, meningkatkan rasa percaya diri, dan membantu anggota mencapai perubahan perilaku yang positif.

Tujuan konseling dalam konteks pendidikan memiliki tujuan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui pemanfaatan dinamika kelompok sehingga peserta didik mampu berkembang secara optimal (Prayitno, 2017). Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok tidak hanya berfungsi sebagai layanan kuratif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan developmental dalam membantu individu mencapai kesejahteraan psikologis.

c. Tahapan Konseling Kelompok

Tahapan konseling kelompok yang paling banyak digunakan dalam penelitian psikologi mengacu pada model yang dikembangkan oleh Corey (2022). Tahapan tersebut terdiri atas lima tahap yaitu tahapan pembentukan, tahap transisi, tahap kerja, tahap terminasi dan tahap tindak lanjut. Kelima tahap tersebut berlangsung secara berkesinambungan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan konseling kelompok yang efektif.

d. Kelebihan konseling kelompok

Konseling kelompok memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan layanan individual karena memanfaatkan kekuatan interaksi sosial antaranggota. Menurut Yalom dan Leszcz (2020). Terdapat beberapa faktor terapeutik (*therapeutic factors*) yang menjadi kekuatan utama konseling kelompok, antara lain: 1) universality, yaitu anggota menyadari bahwa permasalahan yang dialaminya juga dialami oleh orang lain sehingga mengurangi perasaan terisolasi. 2) Instillation of Hope, yaitu munculnya harapan setelah melihat

keberhasilan anggota lain dalam mengatasi masalah.

3) Imparting Information, yaitu anggota memperoleh informasi dan wawasan baru dari konselor maupun anggota kelompok.

4) Altruism, yaitu anggota memperoleh kesempatan membantu orang lain sehingga meningkatkan harga diri.

Selanjutnya 5) Corrective Recapitulation of the Primary Family Group, yaitu pengamalan kelompok membantu anggota memperbaiki pola hubungan interpersonal yang kurang sehat.

6) Development of Socializing Techniques, yaitu anggota belajar mengembangkan ketrampilan komunikasi dan hubungan sosial. 7) Interpersonal Learning, yaitu anggota

memperoleh umpan balik mengenai perilakunya sehingga meningkatkan pemahaman diri. 8) Group Cohesiveness, yaitu terbentuknya rasa memiliki dan saling percaya di dalam kelompok yang menjadi faktor penting keberhasilan konseling.

9) Catharsis, yaitu kesempatan mengekspresikan emosi secara aman sehingga mengurangi tekanan psikologis.

Selain itu, Gladding (2020) menjelaskan bahwa konseling kelompok lebih efisien dibandingkan konseling individual karena mampu melayani beberapa individu secara bersamaan, memperluas kesempatan belajar sosial, meningkatkan dukungan sebaya, serta memfasilitasi perubahan perilaku melalui modelling dan umpan balik

langsung.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok merupakan intervensi psikologis yang efektif dalam meningkatkan kemampuan interpersonal, pengendalian diri, pengambilan keputusan, dan perubahan perilaku. Oleh karena itu, konseling kelompok dipandang sesuai sebagai media untuk mengembangkan karakter anti-korupsi pada remaja karena memungkinkan internalisasi nilai melalui pengalaman belajar, diskusi kelompok, dan latihan perilaku yang berorientasi pada integritas.

3. Social Learning Theory

Social learning Theory merupakan teori psikologi yang menjelaskan bahwa perilaku manusia tidak hanya terbentuk melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui proses belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi yang menyertaina. Bandura menjelaskan bahwa individu dapat mempelajari perilaku baru melalui proses observasi tanpa harus mengalami secara langsung konsekuensi dari perilaku tersebut (Bandura, 1977).

Selanjutnya Bandura mengembangkan *Social Learning Theory* menjadi *Social Cognitive Theory*. Teori ini menekankan adanya hubungan timbal balik antara faktor personal atau kognitif,

perilaku, dan lingkungan. Hubungan timbal balik tersebut sebagai *reciprocal determinism* (Bandura, 1986). Dengan demikian, perilaku individu tidak hanya ditentukan oleh lingkungan, tetapi individu juga mampu mempengaruhi lingkungan melalui perilaku, keyakinan, kemampuan kognitif, dan regulasi diri.

Dalam konteks penelitian ini, *Social Learning Theory* menjadi landasan bahwa karakter anti-korupsi siswa dapat dikembangkan melalui pengalaman sosial dalam konseling kelompok. Siswa dapat mengamati perilaku positif, memperoleh penguatan, mengembangkan keyakinan terhadap kemampuan dirinya, serta belajar mengatur perilaku berdasarkan nilai-nilai integritas.

a. Konsep Observational Learning

Observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan merupakan proses ketika individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun pola perilaku dengan mengamati perilaku orang lain. Menurut Bandura (1977), individu tidak harus mengalami suatu peristiwa secara langsung untuk mempelajari perilaku tertentu. Pengamatan terhadap perilaku orang lain dan konsekuensi yang diterima oleh model dapat menjadi sumber pembelajaran bagi individu.

Bandura (1986) menjelaskan bahwa proses observational learning melibatkan empat proses utama, yaitu:

- 1) *Attention* (perhatian) Individu harus memberikan perhatian terhadap perilaku model.
- 2) *Retention* (retensi) Perilaku yang diamati harus disimpan dalam ingatan.
- 3) *Motor reproduction* (reproduksi perilaku) Individu memiliki kemampuan untuk mempraktikkan perilaku yang telah diamati.
- 4) *Motivational processes* (proses motivasional) Individu memiliki alasan atau motivasi untuk melakukan perilaku tersebut.

Dalam konseling kelompok, *observational learning* terjadi ketika siswa mengamati cara anggota lain menyampaikan pendapat, menghadapi dilema moral, mengakui kesalahan, atau mempertahankan kejujuran dalam situasi tertentu. Pengalaman tersebut dapat menjadi sumber pembelajaran bagi anggota kelompok lainnya. Dengan demikian, nilai-nilai karakter anti korupsi dapat dipelajari melalui pengalaman sosial dan pengamatan terhadap perilaku yang menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kedisiplinan, dan keadilan.

b. Modeling

Modeling merupakan proses belajar melalui pengamatan terhadap perilaku individu lain yang berfungsi sebagai model. Model dapat berupa orang tua, guru, teman sebaya, tokoh masyarakat maupun figure lain yang dianggap memiliki pengaruh oleh individu. Bandura (1977) menjelaskan bahwa perilaku model dapat mempengaruhi individu melalui cara, yaitu:

- 1) Observational learning, yaitu individu mempelajari perilaku baru melalui pengamatan
- 2) Vicarious reinforcement, yaitu individu terdorong melakukan perilaku setelah melihat model penghargaan.
- 3) Vicarious punishment, yaitu individu menghindari perilaku tertentu setelah melihat model memperoleh konsekuensi negatif.

Perkembangan karakter anti-korupsi berupa modeling memiliki peranan penting karena remaja belajar bukan hanya melalui nasihat verbal, tetapi juga melalui perilaku nyata yang mereka amati. Keteladanan guru, konselor, orang tua, dan teman sebaya dapat menjadi model perilaku integritas. Dalam konseling kelompok, konselor dapat berfungsi sebagai model perilaku yang menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan keadilan. Selain itu, anggota kelompok juga

dapat menjadi model satu sama lain melalui pengalaman dan perilaku positif yang ditampilkan selama proses konseling.

c. *Reinforcement*

Penguatan merupakan konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan munculnya kembali suatu perilaku. Dalam social Learning Theory, penguatan tidak hanya berasal dari pengalaman langsung, tetapi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap konsekuensi yang diterima oleh orang lain (Bandura, 1977). Bandura membedakan proses penguatan menjadi:

- 1) *Direct Reinforcement*, penguatan langsung terjadi ketika individu memperoleh konsekuensi secara langsung setelah melakukan suatu perilaku. Contohnya, siswa memperoleh apresiasi setelah berani mengakui kesalahan atau mengembalikan barang yang bukan miliknya.
- 2) *Vicarious Reinforcement*, penguatan perwakilan terjadi ketika individu mengamati orang lain mendapatkan penghargaan karena melakukan suatu perilaku tertentu. Sebagai contoh, ketika seorang siswa melihat temannya memperoleh penghargaan karena menunjukkan kejujuran, maka siswa tersebut dapat terdorong untuk melakukan perilaku yang sama.
- 3) *Self-Reinforcement*, Penguatan diri terjadi ketika individu

memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri setelah berhasil melakukan perilaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pembentukan karakter anti-korupsi, reinforcement dapat digunakan untuk memperkuat perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan berani. Namun, penguatan tidak hanya berupa penghargaan eksternal, tetapi juga perlu diarahkan pada terbentuknya kepuasan internal karena telah melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai moral.

d. *Self-efficacy*

Self-efficacy adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengorganisasi dan melaksanakan Tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu (Bandura, 1997). *Self-efficacy* bukan sekedar kemampuan yang dimiliki individu, melainkan keyakinan bahwa dia mampu menggunakan kemampuan tersebut dalam situasi tertentu.

Bandura (1997) menjelaskan bahwa *self-efficacy* dipengaruhi oleh empat sumber utama, yaitu: pertama, *mastery experiences*, yaitu pengalaman keberhasilan individu dalam menyelesaikan tugas. Kedua, *Vicarious experiences*, yaitu pengalaman keberhasilan orang lain yang dianggap memiliki kesamaan dengan dirinya. Ketiga, *verbal persuasion*, yaitu dukungan dan dorongan dari orang lain. Keempat,

physiological and affective states, yaitu kondisi fisiologis dan emosional individu.

Self-efficacy terkait dengan karakter anti-korupsi berperan dalam membentuk keyakinan bahwa individu mampu mempertahankan kejujuran meskipun menghadapi tekanan teman sebaya, mampu menolak kecurangan, serta berani menyampaikan kebenaran. Konseling kelompok dapat meningkatkan self-efficacy melalui pemberian pengalaman keberhasilan, dukungan anggota kelompok, modeling, dan penguatan positif.

Pembentukan karakter anti-korupsi, reinforcement dapat digunakan untuk memperkuat perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan berani. Namun, penguatan tidak hanya berupa penghargaan eksternal, tetapi juga perlu diarahkan pada terbentuknya kepuasan internal karena telah melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai moral.

e. *Self-regulation*

Regulasi diri merupakan kemampuan individu untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi perilakunya berdasarkan tujuan dan standar tertentu (Bandura, 1986,1991). Menurut Bandura (1991), proses regulasi diri melibatkan tiga proses utama:

- 1) *Self-observation*, yaitu kemampuan mengamati dan menyadari perilaku diri sendiri.
- 2) *Judgmental process*, yaitu kemampuan mengevaluasi perilaku berdasarkan standar atau nilai tertentu.
- 3) *Self-reaction*, yaitu kemampuan memberikan respons terhadap diri sendiri setelah melakukan evaluasi.

Individu yang memiliki regulasi diri yang baik mampu mengendalikan dorongan sesuai dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan perilakunya. Kemampuan ini sangat penting dalam pembentukan karakter anti-korupsi karena perilaku koruptif sering kali muncul akibat kegagalan individu dalam mengendalikan keinginan, tekanan, atau kesempatan.

Self-regulation dalam penelitian ini berperan sebagai mekanisme psikologis yang membantu siswa mempertahankan perilaku sesuai dengan nilai antikorupsi. Siswa tidak hanya mengetahui bahwa korupsi merupakan perilaku yang salah, tetapi juga mampu mengendalikan dirinya ketika menghadapi

situasi yang dapat mendorong perilaku tidak jujur atau tidak bertanggung jawab.

4. *Cognitive Behavioral Counseling*

Cognitive Behavioral Counseling (CBC) merupakan pendekatan konseling yang didasarkan pada asumsi bahwa pikiran, emosi, dan perilaku individu saling berhubungan. Pendekatan ini memandang bahwa permasalahan psikologis dan perilaku maladaptif tidak hanya disebabkan oleh situasi yang dialami individu, tetapi juga oleh cara individu menafsirkan dan merespons situasi tersebut. Oleh karena itu, konseling diarahkan untuk membantu individu mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang tidak adaptif serta mengembangkan pola pikir dan perilaku yang lebih konstruktif (Beck, 1976; Beck, 2020).

Konsep dasar *Cognitive Behavioral Counseling* berfokus pada hubungan antara kognisi, emosi, dan perilaku. Individu dapat memberikan respons yang berbeda terhadap situasi yang sama karena memiliki cara berpikir dan interpretasi yang berbeda. Dalam pendekatan ini, konselor membantu konseli mengenali pikiran otomatis, keyakinan, dan pola berpikir yang memengaruhi munculnya emosi serta perilaku tertentu. Perubahan pada aspek kognitif diharapkan dapat memengaruhi perubahan emosi dan perilaku sehingga individu mampu memberikan respons yang lebih adaptif terhadap berbagai situasi (Beck, 2020; Dobson &

Dozois, 2019).

Salah satu teknik utama dalam *Cognitive Behavioral Counseling* adalah cognitive restructuring atau restrukturisasi kognitif. Teknik ini merupakan proses membantu individu mengidentifikasi pikiran atau keyakinan yang tidak rasional, menguji kebenaran dan kebermanfaatannya, kemudian menggantinya dengan pemikiran yang lebih realistis, rasional, dan adaptif (Beck, 2020). Dalam konteks karakter anti-korupsi, cognitive restructuring dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengubah pemikiran yang membenarkan perilaku tidak jujur, seperti anggapan bahwa kecurangan merupakan hal yang wajar, bahwa pelanggaran kecil tidak merugikan orang lain, atau bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai melalui cara yang tidak etis.

Perubahan perilaku dalam *Cognitive Behavioral Counseling* terjadi melalui perubahan pola pikir yang disertai dengan latihan dan penerapan perilaku baru. Individu tidak hanya diarahkan untuk memahami kesalahan dalam berpikir, tetapi juga dilatih untuk menerapkan respons yang lebih adaptif melalui praktik, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan evaluasi terhadap konsekuensi perilaku. Dengan demikian, Cognitive Behavioral Counseling dapat membantu individu mengembangkan perilaku yang lebih sesuai dengan nilai moral dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, pendekatan CBC diharapkan

membantu siswa mengubah pola pikir yang mendukung perilaku koruptif menjadi pola pikir yang mendukung kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keberanian, dan nilai-nilai karakter anti-korupsi lainnya (Beck, 2020; Dobson & Dozois, 2019).

5. *Value Clarification Technique*

Value Clarification Technique (VCT) merupakan suatu pendekatan yang membantu individu mengklarifikasi, mengeksplorasi, dan menyadari nilai-nilai yang diyakininya melalui proses berpikir, memilih, dan bertindak. VCT tidak secara langsung memaksakan nilai tertentu kepada individu, tetapi membantu individu menyadari nilai yang dimilikinya serta memahami konsekuensi dari pilihan yang diambil. Dengan demikian, individu diharapkan mampu memiliki nilai yang diyakini secara sadar dan mengimplementasikannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari (Raths et al., 1966).

Konsep dasar VCT berangkat dari pandangan bahwa nilai akan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap perilaku apabila nilai tersebut dipilih secara sadar, dipertimbangkan dari berbagai alternatif, dihargai, dan diwujudkan secara konsisten dalam tindakan. Raths et al. (1966) menjelaskan bahwa proses klarifikasi nilai mencakup tiga proses utama, yaitu memilih, menghargai, dan bertindak (*choosing, prizing, and acting*). Oleh karena itu, proses pendidikan nilai tidak hanya berhenti pada pemahaman mengenai

nilai yang benar, tetapi juga mendorong individu untuk mengembangkan komitmen terhadap nilai tersebut dan menerapkannya dalam perilaku.

Proses klarifikasi nilai dilakukan melalui eksplorasi terhadap berbagai pilihan, pertimbangan terhadap konsekuensi setiap pilihan, serta refleksi terhadap nilai yang mendasari keputusan individu. Dalam proses tersebut, individu diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, mendiskusikan dilema nilai, mengevaluasi pilihan, dan memahami alasan di balik keputusan yang diambil. Proses ini dapat membantu individu menjadi lebih sadar terhadap nilai yang diyakini dan membedakan antara nilai yang benar-benar diinternalisasi dengan nilai yang hanya diterima karena tekanan lingkungan (Raths et al., 1966; Simon et al., 1972).

Dalam konteks penelitian ini, VCT relevan digunakan untuk membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai karakter anti-korupsi melalui proses refleksi, diskusi, dan pengambilan keputusan terhadap berbagai situasi moral. Siswa dapat diajak mengeksplorasi konsekuensi dari perilaku jujur maupun tidak jujur, mempertimbangkan nilai yang mendasari suatu pilihan, serta menentukan perilaku yang sesuai dengan nilai integritas. Dengan demikian, VCT diharapkan dapat membantu menghubungkan pemahaman nilai dengan komitmen dan tindakan nyata sehingga

mendukung terbentuknya karakter anti-korupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keberanian, dan keadilan (Raths et al., 1966; Simon et al., 1972).

B. Temuan yang Relevan

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter anti-korupsi dan integritas pada peserta didik dipengaruhi oleh proses pendidikan, keteladanan, interaksi sosial, budaya sekolah, serta pengalaman belajar yang memungkinkan individu menginternalisasi nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian Handayani (2021) menemukan bahwa pendidikan anti-korupsi berbasis enkulturasi yang dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler berkontribusi terhadap pembentukan karakter integritas siswa sekolah menengah.

Penelitian Zulaiha et al. (2025) dengan jumlah responden yang sangat besar, yaitu 57.611 peserta dari 3.098 satuan pendidikan, menunjukkan pentingnya pendidikan karakter anti-korupsi dalam penguatan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian, sekaligus menegaskan bahwa keteladanan pendidik dan pemimpin pendidikan menjadi faktor penting dalam membangun integritas. Sejalan dengan temuan tersebut, Hidayat et al. (2025) menemukan bahwa hasil belajar pendidikan anti-korupsi dan interaksi sosial berpengaruh signifikan terhadap integritas mahasiswa, dengan kontribusi gabungan sebesar 34,6%, sehingga memperkuat peran

proses belajar dan lingkungan sosial dalam pembentukan integritas.

Penelitian Sarmini et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pembentukan nilai anti-korupsi pada siswa sekolah menengah dipengaruhi oleh motivasi personal, pola asuh demokratis, kebijakan sekolah, nilai-nilai budaya lokal, dan sinergi antara keluarga dengan sekolah. Selain itu, Faridli et al. (2025) menemukan bahwa pembelajaran kewarganegaraan berbasis proyek dapat digunakan untuk memperkuat sikap dan perilaku anti-korupsi mahasiswa melalui pengalaman belajar yang aktif dan kontekstual. Penelitian Al-Sabah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa program pendidikan anti-korupsi dapat memengaruhi sikap dan perilaku siswa, sehingga intervensi pendidikan dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam membangun orientasi etis generasi muda.

Sementara itu, Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran mengenai pentingnya integritas dan peran generasi muda dalam pemberantasan korupsi, tetapi masih terdapat persoalan kepercayaan terhadap efektivitas sistem sosial dan hukum dalam pemberantasan korupsi, yang menunjukkan bahwa pendidikan integritas perlu diikuti dengan pengalaman sosial yang konsisten dengan nilai-nilai yang diajarkan. Selanjutnya, kajian Meita dan Darimis (2025) menunjukkan bahwa konseling kelompok berbasis nilai dapat mendukung perkembangan karakter, disiplin, tanggung jawab, efikasi diri, dan regulasi diri peserta didik, meskipun penelitian

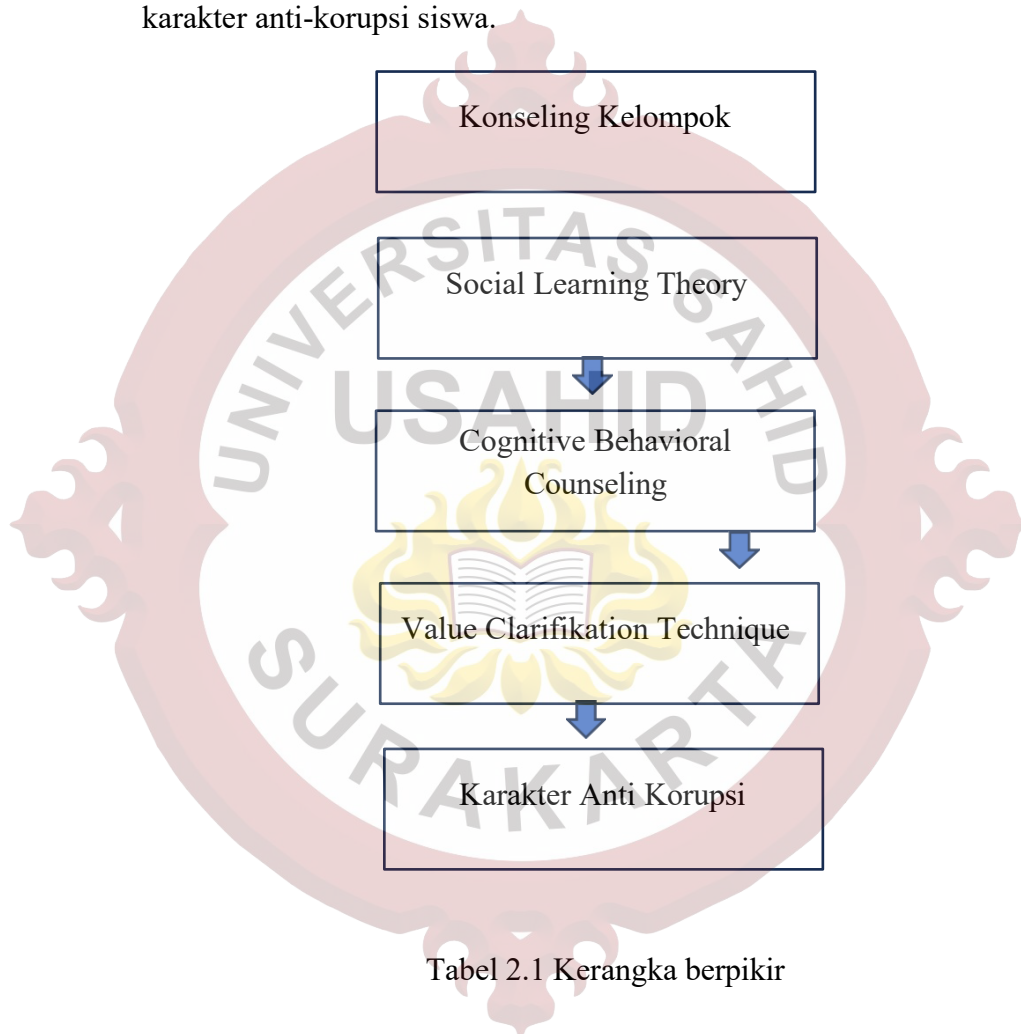
tersebut juga menyoroti keterbatasan berupa ukuran sampel yang kecil, durasi intervensi yang singkat, dan masih terbatasnya penelitian longitudinal.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakter anti-korupsi berkembang melalui kombinasi pendidikan nilai, keteladanan, interaksi sosial, budaya lingkungan, dan pengalaman belajar yang aktif. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pendidikan anti-korupsi melalui kurikulum, enkulturasi, pembelajaran kewarganegaraan, atau program pendidikan umum, sedangkan penelitian yang secara khusus menguji konseling kelompok terstruktur sebagai intervensi psikologis untuk meningkatkan karakter anti-korupsi siswa sekolah menengah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji efektivitas konseling kelompok terstruktur yang memanfaatkan proses pembelajaran sosial, modeling, penguatan, pengembangan *self-efficacy*, dan *self-regulation* dalam meningkatkan karakter anti-korupsi siswa.

C. Landasan Teori

Berdasarkan *Social Learning Theory* (Bandura), individu mempelajari perilaku melalui observasi, imitasi, dan penguatan. Dalam konseling kelompok, siswa memperoleh pengalaman belajar sosial melalui interaksi dengan anggota kelompok. *Cognitive Behavioral*

Counseling membantu mengubah pola pikir yang tidak adaptif menjadi lebih rasional, sedangkan *Value Clarification Technique* membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai integritas. Integrasi ketiga pendekatan tersebut diperkirakan mampu meningkatkan karakter anti-korupsi siswa.



Tabel 2.1 Kerangka berpikir

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian terdahulu, dan landasan teoritis yang telah diuraikan, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak terdapat pengaruh konseling kelompok terhadap karakter anti korupsi siswa.

2. Hipotesis Alternatif (H_1)

Terdapat pengaruh konseling kelompok terhadap karakter anti korupsi siswa.

